

BAB III

Sajian Data dan Pembahasan

A. Sajian Data

Pada Bulan Juni 2013 bertepatan dengan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), masyarakat Indonesia digemparkan dengan sebuah peristiwa yang sangat fenomenal yaitu peristiwa penyebaran stiker bergambar sosok mantan presiden ke-2 RI, yaitu Soeharto. Stiker itu menampilkan gambar sosok Soeharto yang sedang melampaikan tangannya dan disertakan dengan senyuman khasnya yang lebih dikenal dengan istilah *"Smiling General"*. Pada stiker tersebutpun terdapat kalimat yang bertuliskan *"Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to? "*.



Gambar 1.1 Stiker Soeharto Versi *"Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?"*

Seiring perkembangannya, stiker ini diminati banyak masyarakat. Terbukti dari tindakan masyarakat yang mengkonsumsi dengan cara menempelkan stiker itu dikendaraan-kendaraan pribadi mereka, seperti becak, motor, mobil hingga ditempat usaha mereka. Bapak Sarijo penarik becak mengatakan kepada peneliti bahwa dia dengan sengaja membeli sendiri stiker itu seharga sepuluh ribu rupiah (hasil wawancara dengan penarik becak Jl. Pramuka Yogyakarta, 16 April 2014). Hal tersebut jelas membuktikan bahwa masyarakat, terutama masyarakat yang berasal dari kelas ekonomi menengah kebawah sangat menyukai sosok kepemimpinan Soeharto pada era kepemimpinannya. Tetapi lain lagi menurut pandangan dari kalangan aktifis mahasiswa yaitu HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) cabang Yogyakarta, mereka tidak secara langsung membenarkan sosok kepemimpinan Soeharto. Mereka memiliki pendapat teresendiri terhadap kepemimpinan Soeharto.

1. Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta

Fenomena penyebaran stiker bergambar Soeharto yang terjadi saat ini tentu sangat berkaitan sekali jika dikaitkan dengan fase sejarah perjalanan HMI, khususnya HMI MPO. Dalam bab sebelumnya telah dijelaskan bahwa HMI MPO lahir dari sebuah akibat perlakuan Soeharto yang menginginkan semua organisasi masyarakat menerapkan Pancasila sebagai azas tunggal didalam landasan organisasinya. Sementara HMI

MPO menolak keras hal itu dan kemudian memunculkan perlakuan keras pula kepada HMI MPO oleh Soeharto. Sehingga HMI MPO pada masa itu terpaksa menjalankan roda organisasinya melalui organisasi sayap tanpa membawa identitas HMI MPO mereka.

Dari pemaparan sejarah singkat diatas, cukup kuat mengindikasikan bahwa HMI MPO memiliki catatan sejarah yang kelam terhadap tindakan mantan presiden Soeharto. Terkait dengan kontrasnya antara sejarah HMI MPO dengan fenomena penyebaran stiker Soeharto saat ini, tentunya HMI MPO memiliki tanggapan tersendiri terkait hal tersebut.

HMI MPO cabang Yogyakarta melalui kepala Bidang Advokasi Perguruan Tinggi dan Kemasyarakatan, Sultan Akbar Palevi mengatakan bahwa mereka menyepakati pesan pada stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" merupakan salah satu bentuk ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah saat ini, terutama kekecewaan masyarakat terhadap pemerintah ketika menaikkan harga BBM. Ekpresi kekecewaan masyarakat itu dianggap wajar menurut Sultan Akbar Pahlevi karena memang pada kenyataannya rakyat Indonesia saat ini sangat merasakan dampak tersebut, terutama dampak pada sektor ekonomi. Barang pokok kebutuhan masyarakat saat ini serba mahal. Pada

saat wawancara Sultan Akbar Palevi mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Saya sepakat isi pesan pada stiker itu merupakan ekspresi kekecewaan masyarakat terhadap kenaikan BBM, karena dengan stiker tersebut aspirasi masyarakat merasa terwakili dari isi pesan pada stiker itu. Apalagi bagi orang-orang yang pernah menikmati eranya Soeharto, karena eranya Soeharto sering ada bantuan yang disalurkan kepada petani” (Sultan Akbar Palevi, kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

Ekspresi kekecewaan masyarakat yang berujung pada keresahan semakin bertambah ketika harga BBM naik tak bisa dipungkiri lagi. Dampak-dampak yang ditimbulkanpun berdampak sistemik sampai kelapisan masyarakat kelas ekonomi terendah. Mereka yang miskin semakin tertindas dengan naiknya harga BBM ini.

Kemudian Sultan Akbar Palevi menambahkan, Jika dibandingkan dengan era presiden saat ini jelas sangat berbeda dengan eranya Soeharto, dulunya sektor perekonomian terjamin. Harga bahan pokok seperti beras, bawang murah dan mudah sekali didapat. Murahnya harga tersebut tidak lepas dari *Monitoring* yang dilakukan oleh Soeharto. *Monitoring* itu dilakukan secara langsung turun kelapangan melalui Menteri Penerangannya sehingga naik turunnya harga bahan pokok makanan dapat dengan mudah dipantau olehnya. Namun di era kepemimpinan presiden saat ini kondisi itu berbanding terbalik, hak atas kebebasan terjamin

sementara disektor ekonomi mengalami kemerosotan. Masyarakat saat ini bebas untuk mengekspresikan pendapatnya kepada pemerintah. Tetapi kemajuan disektor ekonomi mengalami kemunduran yang sangat signifikan.

Tetapi bagi mereka, HMI MPO cabang Yogyakarta tidak sepakat begitu saja jika dikatakan bahwa kesuksesan Soeharto disektor ekonomi sukses tanpa memiliki sisi negatif sedikitpun. Sultan Akbar Palevi mengatakan dibalik suksesnya Soeharto ternyata Negara berhutang dengan pihak asing. Dalam pertemuan diskusi bersama kader-kader HMI MPO cabang Yogyakarta, Sultan Akbar Palevi mengatakan dalam pembahasan diskusi itu kader-kader mengungkapkan segala aspek-aspek keburukan tindakan diera kepemimpinan Soeharto seperti, hutang Negara dengan pihak asing dan penindasan terhadap hak azasi manusia.

“Dalam pertemuan diskusi dengan kader HMI MPO cabang Yogyakarta, kader-kader mengungkapkan segala bentuk keburukan tindakan Soeharto diera kepemimpinannya. Dalam mengungkapkan pendapat mereka, tak jarang pula kader berdebat, namun perdebatan itu tetap saja mengarah pada segala bentuk keburukan tindakan Soeharto dibalik kesuksesannya. Menurut mereka dibalik kesuksesan semua itu Negara berutang dengan pihak asing, dan juga hak azasi masyarakat terabaikan. Walaupun masyarakat tidak peduli tentang itu saat ini. tapi untuk kita mahasiswa tidak sepakat untuk menerima langsung enaknya eranya Soeharto” (Sultan Akbar Palevi , kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

Dikahir diskusi terkait dengan pembahasan era kepemimpinan Soeharto tersebut, forum diskusi itu menyepakati bahwa segala bentuk tindakan Soeharto yang dilakukannya merupakan tindakan yang sangat buruk, mengabaikan hak sipil masyarakat atas dasar pembangunan.

“Diakhir diskusi, semua kader sepakat pada pembahasan tentang keburukan segala bentuk tindakan Soeharto yang mengabaikan hak sipil masyarakat atas dasar pembangunan” (Sultan Akbar Palevi, kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

2. Fungsi dan Peran Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta

Terbentuknya opini publik diinternal HMI MPO cabang Yogyakarta yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan Soeharto merupakan tindakan yang sangat buruk, mengabaikan hak sipil masyarakat atas dasar pembangunan.

Berkaitan dengan hasil dari pembentukan opini publik tersebut, HMI MPO Yogyakarta sering melakukan kajian-kajian dalam forum diskusi membahas tentang sosok kepemimpinan calon presiden mendatang tahun 2015-2020. Karena bagi mereka salah satu calon presiden saat ini berindikasi memiliki kesamaan gaya kepemimpinan yang otoriter seperti Soeharto. Hal ini dikatakan oleh ketua Umum HMI MPO cabang Yogyakarta, M. Muhtar Nasir kepada peneliti.

“Diskusi terkait pembahasan tentang sosok calon presiden akhir-akhir ini sering diselenggarakan di internal HMI MPO cabang Yogyakarta. Diskusi ini dilakukan karena ada indikasi salah satu calon presiden yang memiliki kesamaan gaya kepemimpinan yang otoriter seperti Soeharto” (M. Muhtar Nasir, Ketua Umum HMI MPO cabang Yogyakarta, 7 Juni 2014).

Dengan adanya indikasi kemiripan gaya kepemimpinan sosok calon presiden tersebut, menimbulkan rasa takut dikalangan aktifis jika calon tersebut terpilih. Ketakutan mereka terletak pada sikap keotoriteran yang akan berdampak terhadap ruang gerak organisasi mereka, yaitu HMI MPO cabang Yogyakarta. hal tersebut diungkapkan oleh ketua umu HMI MPO cabang Yogyakarta, M. Muhtar Nasir. Timbulnya rasa ketakutan tersebut memotifasi kader HMI MPO cabang Yogyakarta untuk ikut dalam aksi yang berkaitan dengan penolakan terhadap pelanggaran HAM (Hak Azasi Manusia) yang terjadi di Indonesia.

3. Proses Pembentukan Opini Publik HMI MPO Cabang Yogyakarta pada Stiker Soeharto versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to? “*

Dalam rangka membentuk opini publik khususnya diinternal HMI MPO cabang Yogyakarta, tentunya ada beberapa proses yang ditempuh sehingga menghasilkan sebuah pendapat yang utuh dan memiliki kekuatan nilai didalamnya.

Dalam perkembangannya terkait pesan stiker Soeharto "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" tersebut, HMI MPO cabang Yogyakarta pernah melakukan diskusi sesama kader anggota mereka. Diskusi itu berlangsung tanpa melalui skenario atau perencanaan diskusi formal organisasi, diskusi itu berlangsung secara spontanitas saja, dilakukan lebih dari satu kali dalam format diskusi yang sama. Mereka membahasnya dalam bentuk diskusi santai yang diikuti empat kader, tetapi terkadang peserta diskusi itu bertambah dan berkurang begitu saja, karena agenda diskusi itu tanpa melalui agenda formal organisasi sehingga tidak ada aturan yang mengikat dalam forum diskusi tersebut.

Pada awal diskusi beragam pendapatpun bermunculan dari kader-kader yang ikut dalam forum diskusi tersebut. Satu persatu dari mereka mengeluarkan pendapatnya berdasarkan referensi yang mereka miliki. Salah satu kader dalam diskusi itu mengatakan bahwa keotoriteran itu diperlukan dalam kepemimpinan, karena menurutnya dengan diberikan hak kebebasan sebeb-bebasnya seperti sekarang ini, bukanlah suatu kemajuan malahan degradasi yang terjadi di negeri ini.

"Dalam sosok diri pemimpin di Indonesia diperlukan juga keotoriteran, karena Negara Indoensia ini membutuhkan hal itu. Nyatanya dengan diberikan kebebasan seperti sekarang ini bukan kemajuan yang didapat malahan kemunduran yang terjadi" (Sultan Akbar Palevi , kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

Pendapat yang disampaikan kader itu merupakan pendapat yang berdasarkan referensi dari orang tua mereka, yang ketika itu orang tuanya masih menikmati era kepemimpinan Soeharto. Dan ada lagi kader yang berpendapat, dimana pendapatnya itu berpandangan positif terhadap Soeharto, karena menurut Sultan Akbar Palevi sebagai pengarah diskusi mengatakan kader itu berpandangan positif terhadap Soeharto karena dia mengacu pada referensi buku Biografinya Soeharto. Dimana buku itu menurutnya merupakan prodaknya keluarga Cendana (Soeharto) sehingga sangat tidak mungkin semua keburukan Soeharto dibuka secara terang berderang didalam buku itu. Tetapi pendapat berbeda dinyatakan dari salah satu kader terkait tentang Soeharto. Dia mengatakan bahwa segala kemakmuran dan kesejahteraan yang dilakukan oleh Soeharto ternyata dibalik semua itu Soeharto berhutang dengan pihak asing dan hutang itu kemudian menjadi beban yang ditanggung oleh rakyat.

“Segala kemakmuran dan kesejahteraan yang dilakukan oleh Soeharto ternyata dibalik semua itu Soeharto berhutang dengan pihak asing dan hutang itu kemudian menjadi beban yang ditanggung oleh rakyat” (Sultan Akbar Palevi , kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

Diawal diskusi ini ternyata pendapat-pendapat yang berbeda terjadi terkait dengan sosok Soeharto. Perbedaan pendapat itu merupakan tahap

proses penyamaan pendapat mereka. Sultan Akbar Palevi mengatakan terjadinya perbedaan pendapat yang diungkapkan kadernya itu, karena memang dalam diskusi itu mereka berusaha untuk bertindak objektif. Jadi mereka membahasnya tidak dari satu sudut pandang saja, melainkan dua sisi pandangan yaitu sisi pandangan positif dan negatif. Sehingga pendapat-pendapat yang dikemukakannya pun berbeda-beda. Ditambah lagi dengan mereka mempunyai referensi masing-masing.

Kemudian diskusi itu perlahan mengarah pada satu pokok pembahasan mengenai sisi buruk tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soeharto di era kepemimpinannya. Indikasi itu diawali dengan salah satu pendapat kader yang mengikuti forum diskusi itu, melalui wawancara peneliti dengan Sultan Akbar Palevi, dia mengatakan kepada peneliti sebagai berikut:

“Rencana pembangunan Waduk Kedo Monggo di Jawa Tengah pada era kepemimpinan Soeharto, masyarakat yang berada disekitar area pembangunan itu digusur secara besar-besaran tanpa memikirkan hak-hak mereka sebagai rakyat” (Sultan Akbar Palevi, kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

Setelah terjadinya perbedaan pendapat-pendapat itu kemudian mengarah pada persamaan pendapat mereka. Kesamaan pendapat itu berupa pengakuan dan kesepakatan mereka terhadap segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Soeharto merupakan tindakan yang

mayoritasnya buruk, karena bagi mereka kemajuan disektor pangan dan pembangunan yang dilakukan Soeharto pada era kekuasaannya ternyata hanya sebatas berpandangan pada sektor kemajuan ekonomi saja, sementara hak sipil masyarakat tidak diperhatikan oleh Soeharto.

4. Pengaruh Pemimpin Opini (*Opinion Leader*) dalam Pengambilan Keputusan

Proses pembentukan opini publik melalui diskusi HMI MPO cabang Yogyakarta berjalan dengan menggunakan dua sudut pandang yaitu sudut pandang positif dan negatif. Pandangan tersebut berkaitan dengan pesan pada stiker Soeharto yang bertuliskan dengan kalimat “ *Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to? “*.

Dengan menggunakan dua pandangan tersebut maka diskusi itu tidak terlepas dari perbedaan pendapat. Karena kader-kader memiliki referensi masing-masing terhadap Soeharto, sehingga diskusi berlangsung tidak terlepas dari pendapat pro dan kontra mereka. Namun untuk mencapai kata kesepakatan bersama, perbedaan pendapat tersebut tidak terlalu lama untuk diperdebatkan karena salah satu dari mereka mempunyai pendapat yang kuat untuk meyakinkan kader yang lainnya bahwa dieranya Soeharto kesejahteraan yang didapatkan oleh rakyat itu, ternyata dibalik semua itu Soeharto berhutang dengan pihak asing dan

pembangunan yang dilakukannya itu hanya sebatas kemajuan disektor ekonomi saja, tetapi untuk hak sipil masyarakat di era Soeharto tidak diperhatikan.

Hasil wawancara dengan Sultan Akbar Palevi kepala Advokasi, Perguruan Tinggi dan Kemasyarakatan HMI MPO cabang Yogyakarta mengatakan bahwa perannya sebagai pengarah diskusi tidak begitu berperan untuk menghasilkan sebuah kesepakatan bersama. Kesepakatan yang dihasilkan dalam forum diskusi tersebut yang menghasilkan kesepakatan bersama tentang pengabaian hak sipil masyarakat oleh Soeharto, bukan hasil skenario ataupun arahan dari dirinya untuk menghasilkan opini mereka, namun tidak terlepas dari kontrolnya (hasil wawancara 11 Maret 2014). Hasil yang disepakati itu merupakan hasil dari pendapat-pendapat mereka sendiri yang kemudian diyakinkan oleh salah satu kader dengan pendapat yang kuat.

“Rencana pembangunan Waduk Kedo Monggo di Jawa Tengah pada era kepemimpinan Soeharto, masyarakat yang berada disekitar area pembangunan itu digusur secara besar-besaran tanpa memikirkan hak-hak mereka sebagai rakyat” (Sultan Akbar Palevi, kepala bidang Advokasi perguruan tinggi dan kemasyarakatan hasil wawancara 11 Maret 2014).

5. Persepsi terhadap Isi Pesan Stiker Soeharto Versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*”

a. Persepsi HMI MPO cabang Yogyakarta terhadap Isi Pesan Stiker Soeharto Versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*”

Fenomena menyebarnya stiker Soeharto Versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*” cukup membuat masyarakat Indonesia khususnya masyarakat di kota Yogyakarta *euforia* dengan hadir stiker tersebut. Fenomena ini seakan mendatangkan pundi-pundi uang kepada mereka. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya pedagang kali lima Malioboro Yogyakarta yang menjual stiker itu. Banyaknya penjual stiker berbanding seimbang dengan para konsumennya. Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwa fenomena ketertarikan masyarakat terhadap stiker Soeharto ini cukup mendapat respon yang baik. Hal ini terlihat dari tempelan-tempelan stiker yang terdapat pada kendaraan-kendaraan pribadi, mobil-mobil pengangkut barang, becak dan tempat usaha makanan.

Dari sudut pandang visual, stiker ini memang memiliki daya ketertarik. HMI MPO cabang Yogyakarta pun mengakui hal tersebut. Sutan Akbar Palevi mengatakan ketertarikannya pada stiker itu

terletak pada foto Soeharto sedang melampaikan tangan dan ditambah dengan senyuman khasnya. (hasil wawancara 11 Maret 2014).

Kemudian sama halnya dengan ungkapan ketua Umum HMI MPO cabang Yogyakarta, M.Muhtar Nasir mengatakan ketertarikannya pada stiker itu terletak pada keberadaan foto Soeharto (hasil wawancara 11 Maret 2014).

Ketertarikan kader HMI MPO cabang Yogyakarta itu bukan berarti tanpa alasan dan tidak mengerti maksud dari stiker tersebut. Adapun persepsi mereka tentang stiker tersebut, Sutan Akbar Palevi mengatakan sebagai berikut :

“Stiker itu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat bahwa era kepemimpinan presiden saat ini tidak sebaik era kepemimpinan Soeharto, terutama disektor ekonomi. Era Soeharto barang pokok serba murah, sedangkan era kepemimpinan presiden saat ini barang pokok serba mahal, sehingga masyarakat resah dengan kondisi Negara saat ini dan berharap sosok seperti Soeharto hadir kembali” (Sultan Akbar Palevi, Kepala bidang Advokasi, Perguruan Tinggi dan Kemasyarakatan, hasil wawancara 11 Maret 2014).

Hal yang sama juga dikatakan oleh ketua Umum HMI MPO cabang Yogyakarta, M. Muhtar Nasir mengatakan Stiker itu ingin menyampaikan sebuah pesan kepada masyarakat bahwa era kepemimpinan Soeharto lebih enak dibandingkan dengan era presiden saat ini (hasil wawancara 11 Maret 2014).

Kemudian persepsi mereka terhadap perbandingan dua era kepresidenan, mereka mengakaui dari sisi ekonomi memang enak nya era Soeharto jika dibandingkan dengan eranya presiden saat ini. tetapi eranya Soeharto hak sipil masyarakat tidak diperhatikan, beda dengan era presiden saat ini. M. Muhtar Nasir mengatakakan sebagai berikut :

“Di era presiden Susilo Bambang Yodhoyono saat ini, memang sektor ekonomi kurang terjamin jika dibandingkan dengan eranya Soeharto. tetapi hak sipil masyarakat diera Soeharto tidak menjamin, sedangkan eranya presiden Susilo Bambang Yodhoyono saat ini menjamin hak-hak tersebut”(M. Muhtar Nasir, Ketua umum HMI MPO cabang Yogyakarta, hasil wawancara 11 Maret 2014).

b. Persepsi Masyarakat terhadap Isi Pesan Stiker Soeharto Versi

“Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to? “

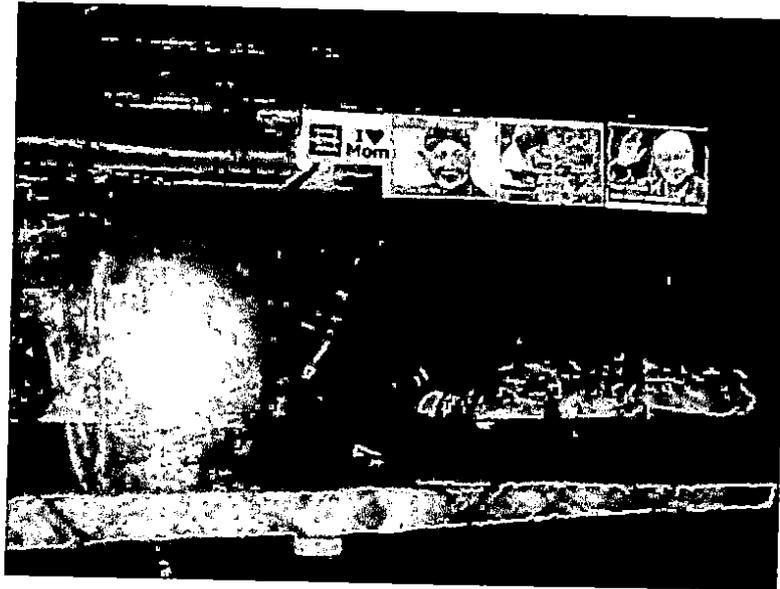
Seiring menyebar luasnya stiker Soeharto saat ini membuat masyarakat tertarik untuk melihatnya bahkan sampai dengan tindakan mengkonsumsinya. Dari hasil pengamatan peneliti dilapangan bahwa fenomena ketertarikan masyarakat terhadap stiker Soeharto ini cukup mendapat respon yang baik. Hal ini terlihat dari tempelan-tempelan stiker yang terdapat pada kendaraan-kendaraan pribadi, mobil-mobil pengangkut barang, becak dan tempat usaha makanan.

Secara visual, ketertarikan masyarakat terhadap stiker ini karena pada stiker itu menampilkan foto sosok Soeharto dan kalimat

“Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?” (Hasil wawancara dengan Sarijo Penarik Becak Jl. Pramuka Yogyakarta, 16 April 2014).

Kemudian proses visual pada stiker itu memberikan pemaknaan tersendiri dari kalangan masyarakat. Pemaknaan ketertarikan itu bagi masyarakat karena sosok Soeharto memiliki peran penting dalam rangka memimpin Negara ini pada masa kepemimpinannya. Bagi mereka sosok kepemimpinan Soeharto pada era kekuasaannya, Soeharto cukup memberikan bukti bahwa dia mampu memberikan kesejahteraan dan menciptakan rasa aman kepada masyarakat. Bapak Turimin yang berprofesi sebagai penjual warung makanan mengatakan sebagai berikut :

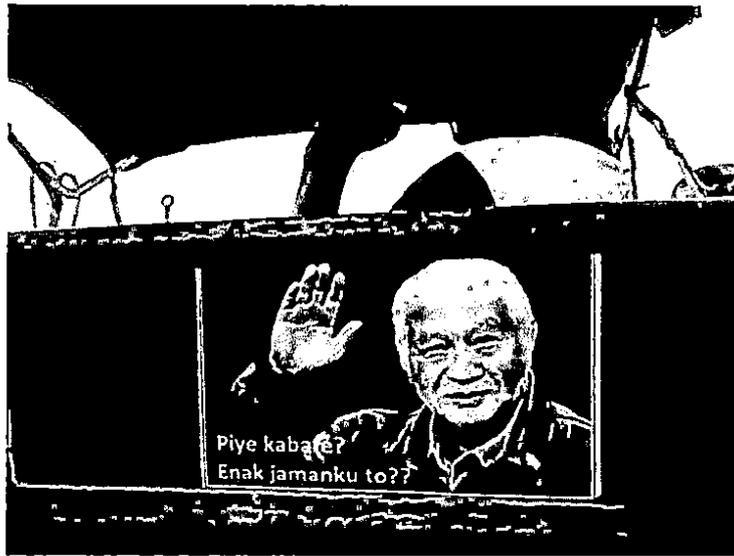
“Saya sangat menyukai sosok Soeharto karena pada era kepemimpinannya sebagai presiden harga barang-barang murah. Dan Nilai tukar rupiah tidak semurah sekarang ini”(Turimin, Pedagang warung makan pasar Giwangan Yogyakarta, hasil wawancara 16 April 2014).



Gambar 1.2 Striker Soeharto Versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*” di Etalase Makanan Pedagang Warung Nasi Di Pasar Giwangan Yogyakarta

Kemudian dari informan penarik becak mengatakan hal yang sama bahwa pada era kepemimpinan Soeharto kesejahteraan dan keamanan terjamin. Dieranya Soeharto masih ada BANPRES (bantuan presiden) berupa bantuan untuk anak-anak desa sekolah. Berikut hasil wawancara dengan bapak Sarijo :

“Pada era kepemimpinan Soeharto hampir rata-rata semua kebutuhan hidup murah. Dieranya Soeharto sering ada bantuan, BANPRES (bantuan presiden) dan juga bantuan untuk anak-anak desa sekolah” (Sarijo, Penarik becak jalan Pramuka Yogyakarta, hasil wawancara 16 April 2014).



Gambar 1.3 Striker Soeharto Versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*” di bagian belakang becak jalan Pramuka Yogyakarta

Terkait dengan kemunculan stiker Soeharto versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*” di era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), artinya stiker ini akan menimbulkan dua pemaknaan pada dua masa kepemimpinan presiden yaitu Soeharto dengan SBY. Dimana pemaknaan tersebut akan mengarah pada sosok kepemimpinan presiden dalam hal jaminan terhadap kesejahteraan rakyat.

Berdasarkan dengan kalimat yang terdapat pada stiker tersebut yang bertuliskan “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*” jelas mengartikan pemaknaan dua masa kepemimpinan. Dari kalangan masyarakat jika dibandingkan pada era Soeharto dan SBY, Mereka mengatakan masih menyukai dan mengakui enak nya era Soeharto

sebagai presiden. Berikut hasil wawancara dengan pedagang warung makanan, bapak Turimin :

“Era kepemimpinan SBY saat ini serba sulit, barang-barang semua mahal. Rakyat kecil sulit mencari nafkah ” ”(Turimin, Pedagang warung makan pasar Giwangan Yogyakarta, hasil wawancara 16 April 2014).

6. Media Penyampaian Pesan Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta

Dalam tahap proses pembentukan opini publik pada pesan stiker Soeharto versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*”, HMI MPO cabang Yogyakarta melalui diskusi yang mereka lakukan menghasilkan keputusan bersama berupa opini publik yang menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan oleh Soeharto didominasi tindakan yang buruk, karena bagi mereka kemajuan disektor pangan dan pembangunan yang dilakukan oleh Soeharto pada era kekuasaannya ternyata hanya sebatas berpandangan pada sektor kemajuan ekonomi saja, sementara hak sipil masyarakat tidak diperhatikan oleh Soeharto.

Opini publik yang sudah terbentuk tersebut tidak dipublikasikan kepada khalayak luas (masyarakat). HMI MPO Yogyakarta hanya menyampaikan hasil opini tersebut dari kader-kekader yang bersifat internal diHMI MPO cabang Yogyakarta saja, melalui diskusi-diskusi.

(M.Natsir, 21 Maret 2014). Menurut Akbar Palevi hasil dari hasil diskusi yang mereka lakukan mengenai pembahasan stiker Soeharto, dari hasil yang disepakati itu disampaikan melalui kader yang ikut serta dalam pembahasan kemudian diteruskan lagi kekader lainnya yang kebetulan saat itu tidak ikut dalam pembahasan.

B. Pembahasan

Opini publik merupakan kekuatan yang paling mendasar dalam hal pengambilan keputusan atas kepentingan orang banyak, karena opini publik merupakan ekspresi ataupun pendapat mayoritas masyarakat yang menginginkan kehendak mereka direalisasikan oleh pemangku kebijakan. Hal ini sejalan dengan hakikat demokrasi yang diterapkan dinegara kita. Dimana rakyat diposisikan sebagai landasan dasar dalam menjalankan konsep demokrasi tersebut. Sehingga peran dan partisipasi masyarakat beropini sangatlah penting, tanpa opini masyarakat demokrasi tidak akan berjalan lancar sesuai dengan harapan.

Mengingat pentingnya peran opini publik tersebut, tentunya tidak sedikit dari kalangan para *elite* pejabat Negara ataupun pihak yang berkepentingan menginginkan sekali opini publik tersebut berpihak kepada mereka. Karena dengan opini tersebut mereka dapat dengan mudah untuk menetapkan kebijakan-kebijakan yang akan mereka putuskan. Oleh sebab itu di Indonesia saat ini sering kali terjadi perang opini antar mereka yang

berkepentingan, baik dalam dataran eksekutif maupun legislatif. Kemudian untuk meraih jumlah mayoritas dari opini publik tersebut, tak jarang dari mereka yang berkepentingan melakukan *setting* ataupun strategi yang dimanipulasi demi menggiring opini publik tersebut sehingga berpihak kepada mereka.

Salah satu upaya penggiringan pembentukan opini publik saat ini yaitu pada fenomena penyebaran stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*". Ketika pada awal munculnya stiker ini ditengah-tengah kalangan masyarakat, stiker ini menuai beragam tanggapan, sehingga menimbulkan kontroversi opini. Dari kalangan masyarakat menengah kebawah mayoritas mengatakan bahwa eranya Soeharto lebih terjamin dari sisi kesejahteraan ekonominya dibandingkan era kepemimpinan presiden Susilo Bambang Yodhoyono saat ini. Sedangkan pendapat dari kalangan mahasiswa, khususnya HMI MPO cabang Yogyakarta tidak membenarkan hal tersebut, mereka lebih melihat kearah sisi dampak negatifnya tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Soeharto pada masa kepemimpinannya, terutama tindakan yang mengatasnamakan upaya pembangunan tetapi berujung pada pelanggaran hak sipil masyarakat.

1. Proses Pembentukan Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta terhadap Isi Pesan Stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*"

Opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*", HMI MPO cabang Yogyakarta menyatakan bahwa segala bentuk tindakan yang dilakukan Soeharto merupakan tindakan yang sangat buruk, mengabaikan hak sipil masyarakat atas dasar pembangunan.

Dalam proses pembentukan opini publik tersebut, tentunya HMI MPO cabang Yogyakarta telah melewati tahapan proses pembentukannya. Mulai dari pembahasan awal sampai berakhirnya sehingga menemukan titik kesepakatan bersama.

Berkenaan dengan pembahasan tentang isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" bahwa diskusi yang diselenggarakan HMI MPO cabang Yogyakarta tersebut bermula dari diskusi informal yang diikuti para kader HMI MPO cabang Yogyakarta di forum diskusi "*tongkrongan*". Diskusi itu berlangsung tanpa melalui tahapan mekanisme formal organisasi seperti menggunakan surat undangan rapat. Kemudian jalannya diskusi itupun tidak menggunakan aturan-aturan formal yang bersifat mengikat.

Hal ini sejalan dengan Anwar Arifin (2011:200) yang menyatakan bahwa dalam diskusi yang bersifat informal ataupun formal (berkelompok) yang kadang-kadang tidak diikat oleh ketentuan, peraturan atau tradisi tetapi dilakukan untuk memenuhi hasrat memecahkan persoalan politik berupaya mewujudkan dalam kenyataan politik.

Sebelum terbentuknya opini publik, ada beberapa hal menjadi alasan terbentuknya opini publik tersebut, Menurut Astrid (1975:107) dengan mengacu pada pendapat Cutlip dan Center. Alasan pembentukan Opini Publik terkait dengan pemabahasan isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" oleh HMI MPO cabang Yogyakarta, sebagai berikut :

- a. Dengan diikuti oleh kader-kader HMI MPO cabang Yogyakarta dalam forum diskusi terkait dengan isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" menandakan bahwa kader-kader tertarik dengan permasalahan tersebut.
- b. Dalam upaya memecahkan permasalahan tentang kontroversi opini terkait dengan isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*", maka dengan itu pula kader-kader HMI MPO cabang Yogyakarta melakukan diskusi sebagai jalan menemukan kesepakatan bersama. Dalam diskusi itu dikemukakanlah pendapat-

pendapat satu persatu dari masing-masing kader. kemudian dari pendapat-pendapat itu menghasilkan salah satu keputusan yang bisa diterima oleh semua kader yang mengikuti diskusi

- c. Kemudian dari pendapat-pendapat kader yang telah dikemukakan selanjutnya diambil sebuah keputusan yang menghasilkan satu keputusan yang bisa diterima oleh semua kader yang mengikuti diskusi.
- d. Berdasarkan teori, seharusnya setelah terbentuk opini public, HMI MPO cabang Yogyakarta merencanakan suatu rincian langkah berikutnya. Sehingga hasil dari pembentukan opini publik tersebut dapat berfungsi dengan maksimal sesuai dengan harapan terkait isu pada pesan isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*",

Dalam upaya menemukan kesepakatan bersama terhadap kontroversi opini terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*", maka dengan itu HMI MPO cabang Yogyakarta menyelenggarakan forum diskusi tersebut. Menurut Nurudin (2008:56-57) ada tiga tahapan pembentukan opini publik, yaitu:

a. *Die Luftartigen Position*

Pada tahap pertama opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta terkait dengan diskusi isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" masih dalam keadaan yang semrawut. Sebab masing-masing kader mengemukakan pendapatnya berdasarkan referensi pengetahuan, pengalaman dan faktor lain yang melekat pada diri mereka, sehingga menimbulkan perbedaan pendapat. Referensi yang mereka gunakan itu terdiri dari cerita dari orang tuanya dan bersumber dari buku biografinya Soeharto. Kedua hal itulah yang memunculkan potensi terjadinya perbedaan pendapat pada awal diskusi berlangsung.

b. *Die Fleissigen Position*

Setelah melalui perdebatan-perdebatan ditahap awal, ditahap ini perlahan arah diskusi mulai terlihat menemukan titik temu kesepakatan. Perdebatan-perdebatan yang terjadipun sudah mulai meredam terkait diskusi tentang isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*". Hal ini ditandai dengan munculnya pendapat salah satu kader yang mengemukakan pendapatnya dengan disertakan realita ataupun fakta tindakan yang dilakukan Soeharto pada eranya kepemimpinannya. Pendapat itu berupa pernyataan salah satu kader tentang pembangunan waduk Kedo - Monggo di Jawa Tengah yang tidak memperhatikan sisi sosial

masyarakat yang menyebabkan penggusuran pemukiman warga yang dilakukan oleh masa kepemimpinan Soeharto.

c. Die Festigen Position

Ditahap akhir ini arah diskusipun sudah sampai pada titik temu yang menghasilkan kesepakatan bersama. Kesepakatan itu berupa pendapat mereka yang menyatakan bahwa bahwa segala bentuk tindakan Soeharto yang dilakukannya merupakan tindakan yang sangat buruk, mengabaikan hak sipil masyarakat atas dasar pembangunan.

2. Pengaruh Pemimpin Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta dalam Pengambilan Keputusan

Pada saat berlangsungnya diskusi HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*", peran pemimpin opini tidak begitu memainkan perannya. Pemimpin opini yang dimaksud yaitu oleh kepala bidang Advokasi, Perguruan Tinggi dan Kemasyarakatan, Sultan Akbar Palevi. Sultan Akbar Palevi dalam diskusi tidak berupaya menggiring opini kelompok diskusi tersebut. Sultan Akbar Palevi ditengah forum diskusi itu hanya berperan sebagai fasilitator yang memediasi agar diskusi itu berlangsung dengan menggunakan dua sudut pandang positif dan negatif. Tujuannya

untuk membiasakan para kader berdiskusi berdasarkan pendapat yang disertakan dengan referensi mereka masing-masing.

Sedangkan dalam teorinya menurut Anwar Arifin (2010:111), dalam upaya menemukan kesepakatan bersama, tentunya diperlukan penggiring opini yaitu pemimpin opini, demi mencapai sebuah tujuan dan harapan tertentu yang diinginkan.

Tetapi dalam berlangsungnya diskusi kader HMI MPO cabang Yogyakarta terkait dengan pembahasan isi pesan stiker Soeharto versi "Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?" hal tersebut tidak terjadi. Skenario penggiringan opini tidak dilakukan oleh Sultan Akbar Palevi yang menjabat sebagai kepala bidang Advokasi, Perguruan Tinggi dan Kemasyarakatan. Padahal Sultan Akbar Palevi termasuk dalam kategori sebagai pemimpin opini yang mempunyai kemampuan untuk menggiring opini tersebut.

Pemimpin opini dalam pembahasan diskusi HMI MPO cabang Yogyakarta menampung berbagai pendapat kader yang berbeda-beda. Hal ini disebabkan karena masing-masing kader mempunyai referensi dari berbagai sumber. Sumber tersebut berasal dari cerita pengalaman orang tua mereka di era orde baru dan bersumber dari buku tentang Soeharto. Sehingga perdebatan dalam diskusi itupun terjadi. Menurut teori *two steps flow of communication*, ketika terjadinya kontroversi pendapat, peran

pemimpin opini sangatlah penting karena memiliki informasi yang lebih besar, sehingga ia lebih banyak tahu tentang banyak persoalan.

Kemudian dari perbedaan itu kemudian mengarah pada kesepakatan bersama melalui diskusi, sehingga menghasilkan kesepakatan bersama. Selanjutnya dalam teori *two steps flow of communication* memaparkan terjadinya perbedaan pendapat akan menjadi satu kesepakatan bersama melalui diskusi bersama. Artinya peran pemimpin opini HMI MPO cabang Yogyakarta sejalan dengan teori *two steps flow of communication*.

3. Fungsi dan Peran Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta

Menurut teori opini publik Ithiel de Sola dalam Anwar Arifin (1973:783) menyebutkan bahwa opini publik memiliki tiga fungsi bagi seseorang, yaitu *the cognitive function*, *the identification function* dan *the resolving of the internal function*. Adapun fungsi dari proses pembentukan opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta pada saat melakukan diskusi terkait pembahasan isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*", sebagai berikut :

1. *The cognitive function*

Dengan diselenggarakannya diskusi oleh HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le?*

Iseh Penak Jaman Aku to?“, kader atau individu pada akhirnya memahami bahwa era kepemimpinan Soeharto sering melakukan tindakan pelanggaran HAM (hak azasi manusia) yang bersembunyi dibalik upaya pembangunan.

2. *The indentification function*

Berakhirnya diskusi HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*“, kemudian kader-kader HMI MPO cabang Yogyakarta memberikan pemahaman kepada kader-kader lainya terkait hasil diskusi tersebut, tetapi dalam format penyampaian yang tidak formal.

3. *The resolving of the internal function*

Setelah disepakati dari hasil diskusi HMI MPO cabang Yogyakarta terkait isi pesan stiker Soeharto versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*“ tidak ada lagi muncul kontroversi opini dari kader-kader HMI MPO cabang Yogyakarta. Artinya kontroversi opini tersebut telah berakhir.

Dari hasil diskusi yang telah disepakati HMI MPO cabang Yogyakarta mengenai stiker Soeharto versi “*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*“ yang menghasilkan pandangan negatif terhadap tindakan-tindakan yang dilakukan Soeharto di era kepemimpinannya, memotifiasi

para kader untuk ikut serta diaksi penolakan terhadap pelanggaran HAM (hak azasi manusia) di Indoensia. Aksi tersebut yaitu adanya pembahasan diskusi diinternal HMI MPO cabang Yogyakarta. Diskusi itu membahas mengenai pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia pada era kepemimpinan Soeharto. Menurut ketua umum HMI MPO cabang Yogyakarta, M.Muhtar Nasir, bertepatan dengan momentum PILPRES (Pemilihan Presiden 2014) forum diskusi itu semakin sering diselenggarakan. Kemudian menurut mereka salah satu dari calon presiden itu berindikasi memiliki kesamaan gaya dalam memimpin Negara seperti Soeharto, yaitu gaya kepemimpinan yang otoriter. Artinya HMI MPO cabang Yogyakarta memahami bahwa ada keterkaitan antara isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" dengan salah satu calon presiden 2014 saat ini.

Menurut teorinya Emory. S Borgardus (1949:484) bahwa opini publik mempunyai tiga fungsi sebagai kekuatan dalam kehidupan sosial dan politik. Ketiga fungsi itu ialah : (1) opini publik dapat memperkuat undang-undang dan peraturan-peraturan, sebab tanpa dukungan pendapat umum, undang-undang dan peraturan-peraturan itu tidak akan berjalan. (2) opini publik merupakan pendukung moral dalam masyarakat dan (3) opini publik dapat menjadi pendukung eksistensi lembaga-lembaga sosial dan lembaga-lembaga politik (Anwar arifin: 2010:19).

Adapun untuk fungsi opini publik berdasarkan teori Emory, S.Borgardus tidak terealisasikan untuk ketiga fungsi tersebut. hal ini dikarenakan hasil dari proses pembentukan opini publik HMI MPO cabang Yogyakarta tidak dipublikasi kemedi massa sehingga tidak memberi pengaruh sama sekali kepada masyarakat dan kelembagaan.

4. Media Penyampaian Pesan Opini Publik HMI MPO cabang Yogyakarta

Dari opini publik yang telah disepakati oleh HMI MPO cabang Yogyakarta, opini publik tersebut mereka suarakan kepada masyarakat melalui aksi eksternal yang mereka ikuti.

Berdasarkan teori opini publik, opini publik akan bernilai manfaat apabila opini tersebut dipublikasikan melalui media kepada masyarakat luas. Karena opini publik tersebut sangat diperlukan bagi keberlangsungan masyarakat. Dengan media isi gagasan, jiwa dapat disampaikan melalui median (Anwar Arifin,2010:16).

Opini publik yang sudah terbentuk tersebut tidak dipublikasikan kepada khalayak luas (masyarakat). HMI MPO Yogyakarta hanya menyampaikan hasil opini tersebut kekader-kader yang lainya yang bersifat untuk konsumsi diinternal saja melalui diskusi-diskusi (M.Natsir, 21 Maret 2014). Menurut Akbar Palevi hasil dari hasil diskusi yang

mereka lakukan mengenai pembahasan stiker Soeharto, dari hasil yang disepakati itu disampaikan melalui kader yang ikut serta dalam pembahasan kemudian diteruskan lagi kekader lainnya yang kebetulan saat itu tidak ikut dalam pembahasan.

5. Persepsi HMI MPO cabang Yogyakarta dan Masyarakat terhadap Isi Pesan Stiker Soeharto versi terhadap Stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*"

a. Persepsi HMI MPO cabang Yogyakarta

Dari sisi visual stiker Soeharto sangat menarik menurut M. Muhtar Nasir selaku ketua umum HMI MPO cabang Yogyakarta. Visual yang menampilkan foto senyumnya Soeharto dan ditambahkan tulisan "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" yang faktor utama kemenarikan stiker tersebut.

Stiker Soeharto itu menurut Sultan Akbar Palevi secara ingin mempersepsikan kepada masyarakat bahwa eranya Soeharto lebih baik dibandingkan era saat ini. Tetapi persepsi mereka terhadap stiker itu tidak semenarik tampilan visualnya. Persepsi mereka tentu bertolak belakang dengan masyarakat saat ini. Bagi mereka di eranya Soeharto tidak ada ruang kebebasan untuk berekspresi, walaupun dilain sisi

masyarakat berharap sosok seperti Soeharto hadir kembali mengisi kepemimpinan presiden dinegeri ini.

Berdasarkan teori, persepsi visual melibatkan sesuatu yang saling mempengaruhi yang kompleks dari tanggapan baik lahiriah maupun yang dipelajari terhadap stimulus visual. Sama halnya dengan apa yang dilakukan masyarakat berdasarkan teori tersebut.

Dari tiga teori persepsi yaitu kausal, kreatif dan selektif, satu dari teori itu yang digunakan HMI MPO cabang Yogyakarta terhadap tanggapan mereka terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" yaitu teori teori Selektif. Karena HMI MPO cabang Yogyakarta secara langsung melihat, merasakan dan memiliki pengalaman hidup di era Soeharto. Artinya mereka tidak hanya sekedar mendengar sejarah atau sekedar melihat Soeharto pada stiker itu saja, tetapi mereka ikut merasakan ketika era Soeharto menjadi presiden.

b. Persepsi Masyarakat

Tanggapan dikalangan masyarakat cukup memberikan tanggapan positif terhadap Soeharto dalam penglihatan mereka pada stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*". Tanggapan mereka menyatakan bahwa era kepemimpinan Soeharto

lebih terjamin kesejahteraannya dibandingkan era presiden saat ini, terutama disektor ekonomi.

Tanggapan positif masyarakat ini terhadap Soeharto terlihat dari aksi mereka menempelkan stiker Soeharto dialat ataupun tempat usaha-usaha mereka. Seperti gerobak warung, becak dan kendaraan mereka. Aksi inipun dilakukan mereka tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun. Menurut pengakuan tukang pecak jl. Pramuka Yogyakarta, dia mengatakan stiker itu dipasang dibecaknya karena dia menginginkan kembali sosok seperti Soeharto. stiker itupun dibeli olehnya sendiri. Dan lagi dia mengatakan bahwa dieranya Soeharto anak-anak dari kalangan kelas ekonomi menengah kebawah merasa terbantu sekali dalam hal bantuan dana pendidikan dieranya Soeharto.

Pengakuan yang sama juga diungkapkan pedagang warung tegal di terminal Giwangan Yogyakarta. Dia mengatakan dieranya Soeharto harga bahan pokok makanan sangat murah dan terjangkau. Sehingga menurutnya sangat berpengaruh positif terhadap tingkat produktifitas usaha daganganya. Dan dengan ditambah lagi dengan daya beli masyarakat sangat mencukupi pada eranya Soeharto.

Berdasarkan teori, persepsi visual melibatkan sesuatu yang saling mempengaruhi yang kompleks dari tanggapan baik lahiriah maupun yang dipelajari terhadap stimulus visual. Sama halnya dengan apa yang dilakukan masyarakat berdasarkan teori tersebut.

Dari tiga teori persepsi yaitu kausal, kreatif dan selektif, satu dari teori itu yang digunakan masyarakat terhadap tanggapan mereka terkait isi pesan stiker Soeharto versi "*Piye Kabare Le? Iseh Penak Jaman Aku to?*" yaitu teori teori Selektif. Karena masyarakat secara langsung melihat, merasakan dan memiliki pengalaman hidup di era Soeharto. Artinya mereka tidak hanya sekedar mendengar sejarah atau sekedar melihat Soeharto pada stiker itu saja, tetapi mereka ikut merasakan ketika era Soeharto menjadi presiden.